



Peran kepala bidang pembinaan sekolah dasar dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di dinas pendidikan kota palangka raya

Mesyi¹,Nurul Hikmah²

Universitas Islam Negeri Palangka Raya,Indonesia

Email:mesyimesyi315@gmail.com, nurulhikmah@uin-palangkaraya.ac.id

Abstract *This study aims to analyze the role of the Palangkaraya City Education Office in developing elementary schools towards quality education. The background of this study is based on the importance of basic education as a foundation in forming competencies/academics, life skills, and character of students, as well as the challenges in the form of quality disparities between schools in the city center and suburban areas. The research method used is qualitative. Data collection techniques used are interviews, observations, and documentation studies. The subjects in this study were the Head of the Education Office, Head of the Elementary School Development Division, school supervisors, principals, and teachers. The data validation techniques used were source triangulation and technical triangulation. Data were analyzed through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the Education Office has played a strategic role through teacher distribution, improving the competence of teaching staff, providing infrastructure, and implementing academic and managerial supervision. However, this study found obstacles in the form of budget limitations, uneven teacher distribution, limited supervisors, and unequal access to training. The conclusion of this study confirms that the Palangkaraya City Education Office plays a crucial role in improving the quality of basic education, but innovative strategies and more inclusive policies are needed to optimally achieve educational equality.*

Keywords: Education Office, primary school development, education quality, Palangkaraya.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya dalam pembinaan sekolah dasar menuju pendidikan yang berkualitas. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pendidikan dasar sebagai pondasi dalam membentuk kompetensi /akademik, keterampilan hidup, dan karakter peserta didik, serta tantangan berupa ketimpangan mutu antara sekolah di pusat Kota dan daerah pinggiran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Teknik pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah menjalankan peran strategis melalui distribusi guru, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan sarana prasarana, serta pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya kendala berupa keterbatasan anggaran, distribusi guru yang belum merata, keterbatasan pengawas, serta ketidakmerataan akses pelatihan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya berperan krusial dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, namun diperlukan strategi inovatif dan kebijakan yang lebih inklusif agar pemerataan pendidikan dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Dinas Pendidikan, pembinaan sekolah dasar, mutu pendidikan, Palangkaraya.

Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang pada gilirannya menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing bangsa. Jenjang pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar, menjadi pondasi awal dalam membentuk kompetensi akademik, keterampilan hidup, serta karakter peserta didik. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan dasar harus mendapatkan

perhatian serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pendidikan dasar, termasuk pembinaan sekolah dasar. Sejalan dengan itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program pembinaan sekolah dasar agar tercapai tujuan pendidikan nasional (Ahsani 2021).

Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki karakteristik wilayah yang cukup unik. Dengan luas wilayah yang besar serta kondisi geografis yang beragam, penyelenggaraan pendidikan dasar menghadapi tantangan tersendiri. Sebagian sekolah dasar terletak di pusat kota dengan akses sarana prasarana yang memadai, sementara sebagian lainnya berada di daerah pinggiran yang masih terbatas fasilitas dan tenaga pendidiknya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah di perkotaan dan sekolah di daerah terpencil. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dituntut mampu merumuskan strategi yang tepat agar layanan pendidikan dasar dapat berlangsung secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah Palangkaraya. Selain tantangan geografis, pendidikan dasar di Palangkaraya juga menghadapi persoalan klasik seperti keterbatasan tenaga pendidik, kualitas guru yang belum merata, minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, serta sarana prasarana yang belum sesuai dengan standar nasional pendidikan. Berbagai persoalan ini tentu akan memengaruhi mutu proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jika tidak ditangani dengan serius, maka tujuan pendidikan dasar untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kompetensi dasar yang kuat akan sulit tercapai (Prastica 2022).

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menggulirkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pada penguatan literasi, numerasi, serta pembentukan profil Pelajar Pancasila. Kebijakan ini tentu memerlukan dukungan nyata dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, agar dapat diimplementasikan secara optimal di sekolah dasar. Peran dinas pendidikan tidak hanya sebatas regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pengawas yang memastikan kebijakan tersebut benar-benar dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memiliki sejumlah program strategis dalam pembinaan sekolah dasar, antara lain peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop, penyediaan bantuan sarana prasarana, supervisi akademik dan manajerial, serta evaluasi mutu pendidikan secara berkala. Upaya-upaya tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar. Namun, pelaksanaan program tersebut sering kali masih menghadapi kendala, baik dari aspek anggaran, keterbatasan SDM, maupun kurangnya partisipasi masyarakat (wenda 2022).

Urgensi penelitian atau kajian tentang peran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya dalam pembinaan sekolah dasar menjadi semakin penting mengingat adanya tuntutan globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut generasi muda memiliki kemampuan literasi, berpikir kritis, kolaborasi, serta penguasaan teknologi. Pendidikan dasar yang berkualitas merupakan prasyarat utama agar anak-anak Palangkaraya dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, pembahasan tentang peran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya dalam pembinaan sekolah dasar menuju pendidikan berkualitas menjadi relevan dan penting. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana peran yang telah dijalankan, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dasar di Kota Palangkaraya (Priantini 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya dalam pembinaan sekolah dasar menuju pendidikan berkualitas. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palangkaraya dengan fokus pada Dinas Pendidikan serta beberapa sekolah dasar di pusat kota maupun daerah pinggiran sebagai lokasi pengumpulan data. Subjek penelitian meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru, sedangkan objek penelitian adalah strategi pembinaan sekolah dasar yang mencakup kebijakan, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana, supervisi, serta evaluasi mutu pendidikan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti rencana strategis, laporan evaluasi, dan data akreditasi sekolah. Teknik pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, baik pejabat Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, pengawas sekolah, kepala sekolah, maupun guru, dapat diketahui bahwa peran dinas dalam membina sekolah dasar memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memandang bahwa pemerataan mutu merupakan isu pokok yang harus segera ditangani, sebab masih terdapat perbedaan mencolok antara sekolah yang berada di wilayah perkotaan dengan sekolah di daerah pinggiran. Perbedaan ini terlihat dari ketersediaan tenaga pendidik, kelengkapan sarana prasarana, serta kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, strategi utama yang dilakukan dinas adalah memastikan distribusi guru yang lebih proporsional, meningkatkan kompetensi pendidik melalui pelatihan, serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan menegaskan bahwa distribusi guru menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi. Banyak sekolah di pusat kota memiliki jumlah guru yang relatif memadai, bahkan berlebih, sedangkan sekolah di pinggiran masih mengalami kekurangan guru, terutama guru kelas dan guru mata pelajaran tertentu. Dinas Pendidikan mencoba mengatasi persoalan ini dengan melakukan penataan ulang distribusi guru dan memanfaatkan tenaga honorer. Guru-guru honorer tersebut kemudian diarahkan untuk mengikuti program sertifikasi agar status mereka lebih jelas dan kesejahteraannya meningkat. Akan tetapi, masalah tidak berhenti sampai di situ. Wawancara dengan kepala sekolah di pinggiran kota menunjukkan bahwa meskipun sudah ada tambahan guru, tingkat kehadiran mereka seringkali tidak konsisten. Hal ini terjadi karena banyak guru berasal dari luar daerah, sehingga mengalami kesulitan transportasi dan kurang memiliki keterikatan emosional dengan sekolah tempat mereka ditugaskan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan distribusi guru sudah baik, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural.

Selain persoalan distribusi guru, Dinas Pendidikan juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menjelaskan bahwa dinas secara rutin mengadakan pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis yang fokus pada implementasi Kurikulum Merdeka, strategi pembelajaran berbasis proyek, serta program literasi sekolah. Pelatihan tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar guru mampu beradaptasi dengan tuntutan kurikulum yang menekankan kreativitas, berpikir kritis, dan kolaborasi. Guru-guru juga difasilitasi dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk mendiskusikan masalah pembelajaran serta mencari solusi bersama. Namun, hasil wawancara dengan beberapa guru menunjukkan bahwa kesempatan mengikuti pelatihan belum merata. Umumnya, hanya guru perwakilan yang diutus untuk mengikuti kegiatan, dan hasilnya belum sepenuhnya dapat ditularkan kepada rekan-rekan sejawat. Guru yang berada di sekolah pinggiran merasa masih kurang mendapatkan kesempatan setara dengan guru di sekolah pusat kota. Kondisi ini mengindikasikan perlunya sistem pembinaan yang lebih merata dan inklusif, sehingga semua guru dapat mengakses program peningkatan kompetensi tanpa terkecuali.

Pengawas sekolah sebagai garda terdepan dalam supervisi juga memiliki peran vital. Dari hasil wawancara dengan beberapa pengawas, diketahui bahwa mereka rutin melaksanakan supervisi akademik untuk memastikan kualitas pembelajaran di kelas serta supervisi manajerial untuk mengawasi administrasi sekolah. Supervisi akademik biasanya meliputi pengamatan langsung proses pembelajaran, penilaian terhadap perencanaan pembelajaran, serta pemberian masukan terkait metode dan media yang digunakan guru. Sementara itu, supervisi manajerial lebih menekankan pada kinerja kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana. Meskipun peran pengawas sangat penting, kenyataannya jumlah pengawas di Kota Palangkaraya masih terbatas. Akibatnya, intensitas pembinaan tidak merata. Beberapa sekolah hanya mendapatkan kunjungan dua atau tiga kali dalam setahun, padahal intensitas yang lebih tinggi dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan pembinaan. Hal

ini menunjukkan adanya ketimpangan antara beban kerja pengawas dengan jumlah sekolah yang harus dibina, sehingga berdampak pada efektivitas pengawasan.

Dari sisi sarana prasarana, hasil wawancara dengan kepala sekolah di pusat kota mengungkapkan bahwa program Dinas Pendidikan telah memberikan dampak positif, terutama melalui penyediaan ruang kelas baru, laboratorium komputer, perpustakaan, serta program digitalisasi pembelajaran. Guru dan siswa mulai terbiasa memanfaatkan perangkat digital, seperti tablet, laptop, dan jaringan internet dalam proses belajar mengajar. Program digitalisasi ini mendukung implementasi Kurikulum Merdeka yang mendorong pembelajaran berbasis teknologi dan literasi digital. Namun, kepala sekolah di daerah pinggiran menyampaikan kondisi yang berbeda. Banyak sekolah masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, minimnya sarana pembelajaran modern, bahkan ada sekolah yang masih menggunakan ruang kelas darurat. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas dan menambah kesenjangan mutu antara sekolah perkotaan dan sekolah pinggiran. Fakta tersebut memperkuat pernyataan dalam latar belakang penelitian bahwa salah satu tantangan besar pendidikan dasar di Palangkaraya adalah kesenjangan sarana prasarana antarwilayah.

Meskipun menghadapi sejumlah hambatan, berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya tetap membawa dampak positif (Hartati 2023). Guru-guru yang mengikuti pelatihan mengaku lebih percaya diri dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Mereka merasa terbantu dengan adanya pelatihan terkait strategi pembelajaran inovatif yang menekankan keterlibatan aktif siswa. Beberapa sekolah bahkan menunjukkan peningkatan prestasi siswa, baik dalam capaian akademik maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Program literasi, misalnya, telah meningkatkan minat baca siswa melalui kegiatan pojok baca kelas, lomba literasi, serta penyediaan bahan bacaan yang lebih beragam. Program digitalisasi juga mendorong siswa lebih terbiasa menggunakan teknologi untuk belajar, sehingga mereka memiliki keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan perkembangan zaman.

Namun, dampak positif tersebut belum sepenuhnya merata. Guru di sekolah pinggiran menyampaikan bahwa mereka masih kesulitan menerapkan Kurikulum Merdeka secara optimal karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya akses pelatihan. Selain itu, kepala sekolah di daerah pinggiran juga menyoroti bahwa anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan sarana prasarana masih terbatas, sehingga kebutuhan sekolah belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, meskipun program pembinaan dari dinas sudah berjalan baik, masih ada tantangan dalam hal pemerataan, baik terkait tenaga pendidik, sarana prasarana, maupun akses pelatihan.

Jika dikaitkan dengan teori manajemen pendidikan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling) sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan, meskipun masih ada beberapa aspek yang belum optimal. Perencanaan terlihat jelas dari adanya program strategis seperti pemerataan guru, pelatihan berkelanjutan, dan digitalisasi sekolah. Pengorganisasian tampak dari pembentukan kelompok kerja guru serta penugasan pengawas sekolah. Pelaksanaan tercermin dari

implementasi program di lapangan, meskipun belum sepenuhnya merata. Sementara itu, fungsi pengendalian dilakukan melalui supervisi dan evaluasi, tetapi masih terhambat oleh keterbatasan jumlah pengawas dan keterbatasan anggaran.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menguatkan latar belakang bahwa peran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya sangat krusial dalam membina sekolah dasar menuju pendidikan berkualitas. Upaya yang telah dilakukan menunjukkan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan struktural, geografis, dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif yang mampu menjawab tantangan tersebut, seperti memperluas akses pelatihan berbasis daring agar menjangkau semua guru, menambah jumlah pengawas sekolah untuk memperkuat pembinaan, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan untuk pemerataan sarana prasarana (Mazrur, M.2022). Apabila langkah-langkah ini dapat diwujudkan, maka cita-cita pemerataan mutu pendidikan dasar di Kota Palangkaraya akan semakin mendekati kenyataan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memiliki peran yang sangat penting dalam membina sekolah dasar menuju pendidikan yang berkualitas. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis yang mencakup pemerataan distribusi guru, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial. Upaya ini sejalan dengan visi nasional untuk mewujudkan pendidikan yang merata, berkeadilan, dan bermutu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dari sisi pemerataan mutu pendidikan, dinas berusaha menanggulangi ketimpangan antara sekolah di wilayah perkotaan dengan sekolah di pinggiran melalui penataan distribusi guru dan pemenuhan kebutuhan tenaga honorer. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala karena sebagian guru tidak menetap di lokasi penugasan sehingga tingkat kehadiran dan loyalitasnya belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan guru telah dirancang dengan baik, tetapi perlu penguatan dalam implementasinya agar benar-benar berdampak pada kualitas layanan pendidikan.

Dalam aspek peningkatan kompetensi guru, dinas secara rutin menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan kegiatan kelompok kerja yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka serta pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif. Meskipun program ini terbukti meningkatkan kapasitas guru, pemerataannya masih belum tercapai sepenuhnya. Guru di sekolah perkotaan lebih banyak memperoleh akses dibandingkan dengan guru di sekolah pinggiran. Dengan demikian, perlu ada langkah khusus agar kesempatan pengembangan profesional dapat dirasakan secara adil oleh seluruh guru sekolah dasar di Palangkaraya.

Supervisi akademik dan manajerial yang dilaksanakan pengawas sekolah juga menjadi bagian penting dari peran dinas. Namun, keterbatasan jumlah pengawas membuat intensitas pembinaan tidak merata, sehingga beberapa sekolah hanya mendapatkan supervisi beberapa kali dalam setahun. Demikian pula dengan penyediaan sarana prasarana, meskipun sekolah di pusat kota telah menikmati fasilitas modern termasuk program digitalisasi pembelajaran, sekolah di daerah pinggiran masih menghadapi keterbatasan yang cukup serius. Hal ini memperlihatkan bahwa masih ada kesenjangan dalam kualitas pendidikan dasar yang perlu segera diatasi.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya telah menjalankan fungsi manajemen pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan, baik dari sisi anggaran, distribusi tenaga pendidik, maupun keterbatasan sarana prasarana. Untuk mewujudkan pendidikan dasar yang benar-benar berkualitas dan merata, diperlukan strategi inovatif, peningkatan jumlah pengawas, perluasan akses pelatihan, serta optimalisasi penggunaan anggaran pendidikan. Dengan langkah-langkah tersebut, cita-cita pendidikan berkualitas di Kota Palangkaraya akan semakin mendekati kenyataan.

Daftar Referensi

- Ahsani, E. L. F., Romadhoni, N. W., Layyiatussyifa, E. L., Anggita, W. N., & Lusiana, P. (2021). *Penguatan Literasi Digital dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar Indonesia Den Haag (SIDH)*. E-Studia: Jurnal Pendidikan, Vol. 8(2). [Upy](#)
- Prastica, N. A. D., & lainnya. (2022). *Manajemen Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Islam Terpadu di Palangkaraya*. Syntax Idea. jurnal.syntax-idea.co.id
- Wenda, D. (2022). *Peran Dinas Pendidikan dan Pengajaran dalam Pelayanan Pendidikan Dasar*. Eprints IPDN. [Eprints IPDN](#)
- Priantini, D., Suarni, N. K., Adnyana, I. K. S. (tahun publikasi). *Analisis Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar untuk Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas*. Jurnal Penjaminan Mutu Pendidikan. [Google Scholar](#)
- Hartati, T., Setiawan, D., Sopandi, W. (tahun). *Kemampuan menulis teks eksplanasi dan penguasaan konsep siswa sekolah dasar melalui implementasi model pembelajaran RADEC*. [Google Scholar](#)
- Upaya Meningkatkan Pendidikan Berkualitas di Sekolah Dasar (SD)*. Jurnalistiqomah. [Jurnalistiqomah](#)
- Menuju Pendidikan Berkualitas: Kontribusi Indonesia terhadap Mutu Pendidikan Dasar*. Jurnalistiqomah. [Jurnalistiqomah](#)
- Laporan Penelitian Implementasi Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 Kelas 1 SD di Palangka Raya dan Kabupaten lain, Kalimantan Tengah*. Mazrur, M. (2022). Digilib IAIN Palangka Raya. [Digilib IAIN Palangkaraya](#)
- Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia*. Raharjo, S. B. (2012). Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 16(2), 511-532. [E-Journal UNUJA](#)

- Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar* – Profil resmi Disdik Palangka Raya. disdik.palangkaraya.go.id
- Tentang Fungsi Pokok Dinas Pendidikan Kalteng*, termasuk pembinaan pendidikan dasar. Disdik Kalimantan Tengah. disdik.kalteng.go.id
- Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Pemerintah Kota Palangka Raya. [Peraturan BPK](#)
- Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Guru dan Pemenuhan Kualifikasi Pendidik di Sekolah Dasar*. Kurniawati, F. N. A. (2022). Jurnal FKIP. [Jurnal Cokroaminoto](#)
- Edukasi Tematik: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* – berbagai artikel tentang praktik pembelajaran dan inovasi SD. ejurnal.unisap.ac.id
- Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045*. Ngan Sui-Ni. (2023). ArXiv. [arXiv](#)
- Analisis Kesulitan Belajar Dalam Menyimak Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SDN 19 Tanjung Tegang*. Lepiana, L., Mardiana, M., & Tirsa, A. (2024-2025). Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar. [SINTA](#)
- Analisis Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu*. Gunawan, Fahrul, dkk. (2022). Skripsi Universitas Tadulako.